

INDUSTRI GULA DI KARESIDENAN CIREBON TAHUN 1870-1930 DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

Oleh: Jayanto
11407141009

Abstrak

Industri gula telah menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda. Permintaan akan gula di pasaran internasional mengakibatkan penanaman dan pengolahan tanaman tebu semakin ditingkatkan. Karesidenan Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil utama tebu. Letak geografisnya sangat mendukung bagi pembudidayaan tanaman ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aktivitas industri gula dan mengkaji perkembangan industri gula serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya industri gula yang terdapat di Karesidenan Cirebon pada tahun 1870-1930.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yaitu tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber yaitu mengkaji keaslian dan kredibilitas sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu mencari keterkaitan makna, yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu merangkaikan fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya UU Agraria 1870, letak geografis, dan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan Karesidenan Cirebon banyak diminati oleh pengusaha asing khususnya dalam bidang industri gula. Perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula di Karesidenan Cirebon terus meningkat sejak masa Sistem Tanam Paksa hingga 1930-an, dan tercatat ada 16 pabrik gula dengan areal seluas 13.151 Ha. Untuk meningkatkan produktifitas industri gula, pemerintah dan pengusaha swasta bekerjasama dalam memperbaiki dan membangun sarana irigasi dan transportasinya. Industri gula juga memberikan dampak sosial yaitu terciptanya lapangan kerja di perkebunan, yang memunculkan kelas buruh lepas atau disebut kuli. Dampak ekonominya adalah monetisasi di pedesaan berupa meningkatnya aktivitas ekonomi dengan adanya peredaran uang di pedalaman, serta mobilitas sosial yang dinamis di kalangan masyarakat Karesidenan Cirebon. Dampak lainnya ialah munculnya gerakan sosial berupa huru-hara, pemogokan buruh, dan pembakaran lahan tebu.

Kata Kunci: Industri Gula, Karesidenan Cirebon, Dampaknya.

SUGAR INDUSTRY IN CIREBON RESIDENCY IN THE YEARS OF 1870-1930 AND THE IMPACTS ON SOCIETY

By:

Jayanto and Mudji Hartono, M.Hum.

NIM. 11407141009 and NIP. 19550115 198403 1 001

Abstract

Sugar industry became the one of many sources of income of the government of Dutch East Indies. The international market demand for sugar had resulted in the increase of the planting and the cultivation of sugar cane. Cirebon Residency (*Karesidenan Cirebon*) was one of the main production areas of sugar cane. The geographic location of Residency of Cirebon was the supporting factor of the sugar cane cultivation. Thus, the aims of writing this thesis are to know about the activities in sugar industry, to investigate the development of sugar industry, and also to seek an answer about the impact of sugar industry in Cirebon Residency in 1870-1930.

The conducted research used historical-critical method. The first one is heuristic which is the collection of data or the relevant historical sources. The second is source criticism which evaluates the authenticity and the credibility of the information source in terms of physic and content. The third is interpretation which seeks the meaning relation of the gathered facts to make it more meaningful. The last is historiography which organizes the whole facts and the meaning into a chronologically and systematically historical writing.

The results show that the application of Agrarian Law 1870, the geographic location, and the high population made Cirebon Residency attracted foreign entrepreneurs particularly in the sector of sugar industry. The sugar cane plantations and the sugar industry in Cirebon Residency had grown by years since the era of The Cultivation System (The Enforcement Planting) until 1930's. It was also stated that there were 16 sugar industries in areas of 13.151 Ha. To increase the productivity of sugar industry, the government and private entrepreneurs cooperated in repairing and building the irrigation facilities and the means of transportation. The sugar industry also made social impact on the employment in plantations which brought out unskilled and cheaply employed casual workers or called coolies. On the other hand, the economy impact was village monetization marked by the increase of economic activities such as money circulation in remote areas and dynamic social mobility in Cirebon Residency. The other impact was the social movement namely insurrections, labor strikes, and burnings of sugar cane fields.

Keywords: Sugar Industry, Cirebon Residency, The Impacts.

A. Pendahuluan

Masuknya Belanda ke wilayah kepulauan Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh yang besar bagi kehidupan rakyat pribumi, salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi.¹ Perekonomian Belanda yang dibangun di wilayah Indonesia dimulai sejak masa VOC yang kemudian berlanjut ketangan Pemerintah Kolonial Belanda. Industri gula merupakan salah satu sektor penting yang erat kaitannya dengan perekonomian di Hindia Belanda. Keberadaan industri gula pada masa kolonial Belanda, wilayah Indonesia atau lebih tepatnya di Jawa mampu mendominasi perekonomian Hindia Belanda secara keseluruhan.

Gula merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi perekonomian Hindia Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun pabrik-pabrik gula di Jawa. Daerah pusat industri gula berada di Jawa, dan salah satunya terdapat di Karesidenan Cirebon. Sebelum tahun 1930 Indonesia telah menjadi produsen gula di pasaran dunia. Tanaman lain yang termasuk ke dalam komoditas penting lainnya ialah nila (indigo), kopi, tembakau, kapas, lada, teh, dan kayu manis, yang ditanam dalam skala kecil.

Masa kejayaan industri gula sudah terjadi sejak periode Sistem Tanam Paksa (1830-1870) hingga masa Liberal yaitu sekitar 1870-1900-an. Sejak tahun 1830 Pemerintah Kolonial Belanda mulai melaksanakan eksploitasi ekonomi dan penetrasi kekuasaan yang lebih luas. Sistem Tanam Paksa mulai dilaksanakan dengan pembukaan beberapa jenis perkebunan dan secara langsung dikontrol oleh

¹ Retno Puji Lestari, *Nasionalisasi Industri Gula di Madiun: Pabrik Gula Pagottan, Kanigoro, dan Redjo Agung Baru Tahun 1950-1966*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 1.

Pemerintah Kolonial Belanda.² Dalam pelaksanaan penanaman wajib itu diutamakan jenis tanaman yang menghasilkan komoditas ekspor di pasaran Eropa.

Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kolonial Belanda memperoleh keuntungan yang maksimal, usaha ini dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan tanah pertanian dan tenaga kerja penduduk secara paksa. Industri gula dalam perkembangannya pada masa kolonial lebih banyak dibuka di Jawa. Hal ini juga disebabkan karena di Jawa keadaan tanah, iklim, dan penduduknya sangat cocok bagi perkembangan industri gula. Proses penanaman tebu tersebut dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan para pengusaha swasta pada lahan yang awalnya dipakai sebagai lahan pertanian tanaman pangan.

Dapat dikatakan bahwa industri gula menjadi sektor penting bagi perekonomian tanah jajahan karena gula merupakan komoditas yang laku di pasaran internasional, yang pada akhirnya dapat mendukung perekonomian Pemerintah Kolonial. Berkembangnya industri gula dalam menggunakan lahan persawahan pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang rumit. Hal ini dikarenakan terjadi persaingan antara tanaman padi dan tanaman ekspor, terutama tebu di sawah mereka.³

Industri gula sendiri merupakan bagian dari sistem perekonomian komersial dan kapitalistik. Sistem industri gula yang di dalamnya terdapat sektor perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, juga bersifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga

² Nazat Adi Prabowo, *Perkebunan Tebu di Karesidenan Tegal 1830-1870*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hlm. 4.

³ Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 128.

kerja besar, pembagian tenaga kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja rapih, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia.

Pengelolaan perkebunan tebu di Karesidenan Cirebon banyak dilakukan oleh orang-orang Cina.⁴ Hal ini nantinya berpengaruh bagi keadaan sosial ekonomi masyarakat dan berbagai pembangunan infrastruktur berkaitan dengan perkembangan industri gula di Karesidenan Cirebon. Sejalan dengan hal itu, dampak dari perkembangan dari industri gula di Karesidenan Cirebon mengakibatkan penanaman varietas padi berumur pendek tertunda akibat dari penanaman tebu.

B. Kondisi Umum Karesidenan Cirebon

Wilayah Cirebon secara teritorial geografis terletak di tepian pantai utara Jawa (Pantura), yang dilengkapi dengan sungai-sungai yang sangat penting peranannya sebagai jalur transportasi ke pedalaman yang letaknya di sekitar Pelabuhan Cirebon yaitu: Sungai Cimanuk, Sungai Pekik, Sungai Kesunean dan Sungai Cilosari.⁵ Sejak tahun 1705, wilayah Cirebon sudah dikuasai oleh Pemerintah Kolonial. Tetapi ketika itu VOC-lah yang pertamakali menguasai wilayah Cirebon sebagai imbalan atas jasanya membantu Pakubuwono I dalam menduduki takhta Mataram.

⁴ Robert Van Neil, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), Hlm. 71.

⁵ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*, (Bandung: UNPAD & PEMDA Jawa Barat, 1991), hlm. 474.

Wilayah Karesidenan Cirebon meliputi: Indramayu, Gebang, Daerah Kasultanan Cirebon, yang meliputi daerah-daerah yang kemudian menjadi wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta tanah partikelir di Kandanghaur dan Indramayu, dan daerah Cirebon-Priangan, yang meliputi Galuh, Limbangan dan Sukapura. Depolitisasi dan demiliterisasi oleh Pemerintah Kolonial di Karesidenan Cirebon telah berhasil menempatkan seorang *residen* yang berprofesi sebagai pedagang (*Koopman*). Pada masa itu, VOC dan Pemerintah Kolonial telah menempatkan tidak kurang dari 69 *residen* yang berkuasa di Cirebon. Setelah berjaya kurang lebih 2 abad (1602-1799) sebagai hegemonik dalam bidang politik, militer dan ekonomi di Hindia Belanda, VOC secara mengejutkan akhirnya mengalami kebangkrutan dan keruntuhan di penghujung abad XVIII.

Kebangkrutan dan keruntuhan tersebut disebabkan oleh perilaku para pegawainya yang korup dan serakah, hutang yang berlimpah untuk membiayai peperangan baik di Eropa maupun di tanah jajahan dan kalah bersaing dalam perdagangan dengan perusahaan Inggris dan Perancis. Oleh karena itu VOC secara resmi dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799.⁶ Sejak saat itulah penetrasi ekonomi yang diperankan oleh para pedagang (*Koopman*) diganti. Setelah itu dan selama masa Sistem Tanam Paksa berlangsung, wilayah Karesidenan Cirebon tidak berubah. Perubahan wilayah Karesidenan Cirebon hanya terjadi dalam hal administrasi, tidak pada luas wilayahnya. Selama masa

⁶ Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, (Jakarta: Djambatan, 2004) hlm. 19.

Sistem Tanam Paksa hingga masa berikutnya yaitu masa perkebunan besar atau masa liberal sekitar tahun 1870-1900an wilayah Karesidenan Cirebon terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.⁷ Batas-batas wilayah Karesidenan Cirebon ditentukan sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Karesidenan Priangan dan Karesidenan Karawang.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Karesidenan Tegal dan Karesidenan Banyumas.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Karesidenan Banyumas dan Priangan.

Penduduk Karesidenan Cirebon secara umum terdiri dari berbagai etnis. Di antaranya yaitu orang Jawa, Eropa, Cina, Arab, India, dan orang Timur Asing lainnya. Golongan non pribumi menempati kota-kota karesidenan, kabupaten, dan sebagian kecil bertempat tinggal di pusat kota kawedanan.⁸ Dalam stratifikasi sosial pada masa kolonial, di pelbagai tempat golongan etnis Cina merupakan penduduk non pribumi terbesar, dan mereka kebanyakan adalah Cina peranakan. Kedudukan golongan etnis Cina dan Timur Asing berada pada urutan kedua setelah bangsa Eropa, dan penduduk pribumi menduduki tempat terbawah meskipun di daerah-daerah merupakan golongan mayoritas.

⁷ Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 165.

⁸ Mudji Hartono, *Sejarah Sosial Ekonomi: Kemiskinan Penduduk di Daerah Pantai Utara Jawa (1850-1940)*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 13.

Penduduk daerah Cirebon sebagian besar beragama Islam, Karesidenan Cirebon resminya masuk lingkungan Jawa Barat dan Tanah Pasundan, tetapi sebagian besar penduduknya berbahasa Jawa-Cirebon.⁹ Di wilayah bagian utara Kabupaten Cirebon penduduknya berbahasa Jawa-Cirebon, di bagian timur berbahasa Jawa-Tegal, di sebelah selatan campuran antara penduduk yang berbahasa Sunda dan Jawa. Di Kabupaten Kuningan penduduknya semuanya menggunakan bahasa Sunda.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara kultural penduduk pribumi di Karesidenan Cirebon terdiri dari orang Sunda dan orang Jawa. Orang Sunda menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pergaulannya. Mayoritas mereka berada di bagian selatan Karesidenan Cirebon, yaitu Kabupaten Majalengka, Kuningan, Galuh, dan bagian Kabupaten Cirebon. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulannya dengan tiga dialek, yaitu dialek Cirebon, Indramayu, dan Tegal. Dialek Cirebon dipakai oleh penduduk di bagian utara Kabupaten Cirebon. Dialek Indramayu dipakai oleh penduduk di Kabupaten Indramayu. Dialek Tegal dipakai oleh penduduk bagian timur Kabupaten Cirebon.¹⁰ Struktur masyarakat pedesaan di Karesidenan Cirebon dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu *sikep*, *tangkong*, dan *wuwung*.

⁹ ANRI, *Memorie van Overgave van Resident van Cirebon, C.J.A.E.T. Hilje*, 3 Juni April 1930.

¹⁰ Awaludin Nugraha, “Industri indigo dan Kehidupan Sosial Ekonomi Petani di Karesidenan Cirebon 1830-1864”, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2001), hlm. 52.

Sebagian masyarakat pribumi di Karesidenan Cirebon hidup dari sektor pertanian. Mereka terutama hidup di pedesaan. Desa adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan. Di Jawa, desa mengandung arti sebagai suatu “desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan di bidang sosial dan ekonominya.¹¹ Meskipun demikian, di Karesidenan Cirebon sendiri juga terdapat beberapa sektor sumber perekonomian di luar sektor pertanian seperti di bidang pelayanan, jasa, dan pekerjaan nonpertanian di kalangan penduduk pribumi di daerah tersebut adalah industri rumah tangga dan perdagangan kecil-kecilan (*petty trade*).¹²

D. Perkembangan Industri Gula di Karesidenan Cirebon

Terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam mendirikan sebuah pabrik gula, yaitu:¹³

1. Luas sawah yang dibutuhkan untuk penanaman tebu harus paling sedikit lima kali luas areal kebun tebu yang diinginkan. Jarak sawah paling jauh 4 *paal* (6 km) dari desa dan sebaiknya tidak terlalu jauh dari pabrik.
2. Desa-desa tersebut tidak boleh terlalu jauh dari hutan, karena pabrik memerlukan kayu bakar dan kayu papan.

¹¹ Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 11.

¹² J. Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 166.

¹³ Fetiana, “Perkebunan Tebu di Karesidenan Besuki Masa Liberal”, Skripsi, Yogyakarta: UNY, 2013, hlm. 62.

3. Harus ada persediaan air untuk pengairan kebun-kebun tebu dan untuk menggerakkan roda air pabrik. Oleh karena itu, lokasi di dekat sungai merupakan pilihan paling tepat.
4. Hasil-hasil produksi gula harus bisa di distribusikan ke pelabuhan Cirebon dengan menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga hasil produksi gula itu dapat diekspor.

Keempat faktor itu menjadi pertimbangan bagi para pengusaha industri gula di Karesidenan Cirebon. Banyaknya jumlah pabrik gula di Karesidenan Cirebon tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, oleh sebab itu Pemerintah Kolonial Belanda semakin mendorong proses industrialisasi di Karesidenan Cirebon. Alasannya jelas bahwa tebu merupakan salah satu industri primadona yang dapat mendatangkan keuntungan bagi para pengusahanya melalui perdagangan ekspor ke Negara-negara Eropa dan Amerika.

Hasil produksi gula swasta di Karesidenan Cirebon tahun 1881-1882

Distrik	Pabrik	Pemilik	Penanaman (bau)	Produksi (pikul)
Cirebon Sindanglaut	Kalitanjoeng	J.E. Court	200	7.500
	Tjigobang	Evren. J.T.	310	8.597
	Waled	-	300	13.644
	Kalimaro	-	303	11.568
	Loewoenggadjah	Tan T. Keng	253	9.760
Koeningan	Pangang	O.Giok Lan	105	4.000
	Djambar	T. Long S.	22	150
	Pagoendan	T.T. Kwan	6	26
	Doekoegaboek	G.S. Tjiang	10	120
			1509	55.365

Sumber: *Koloniaal verslag van 1882*, Bijlage CCC.

Proses pengerjaan lahan tebu di Karesidenan Cirebon menggunakan sistem Reynoso, sistem ini mulai dilaksanakan pada 1863.¹⁴ Penggarapan lahan tebu biasanya sudah dimulai sejak bulan Maret. Pertama-tama berbagai got atau parit untuk pengairan digali dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanaman. Dalam kepentingan penanaman, parit dibuat sepanjang 2,4 m, sebelah kiri kanannya dibersihkan dalam jarak 0,2 m yang disebut *gombengan*.¹⁵ Selama proses penanaman tebu di Karesidenan Cirebon, pihak pengusaha baik dari pemerintah ataupun swasta menggunakan lahan sawah terbaik. Untuk selanjutnya perluasan areal penanaman tebu terus dilakukan di Karesidenan Cirebon dari tahun 1849 hingga 1937.¹⁶ Industri perkebunan tebu/gula yang memang menghasilkan uang bagi penduduk desa yang menyewakan tanahnya, sebaliknya menguasai banyak tenaga kerja dan tanah persawahan yang paling subur.¹⁷

E. Dampak Industri Gula di Karesidenan Cirebon

Keberadaan pabrik gula beserta perkebunannya telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di Karesidenan Cirebon. Dari serangkaian perubahan itu di antaranya ialah adanya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat pedesaan. Pada umumnya masyarakat desa di Karesidenan Cirebon tidak berbeda dengan masyarakat desa lainnya yang ada di Jawa. Struktur sosial

¹⁴ Sistem ini ditemukan oleh Don Alvaro Reynoso dari Kuba, Lihat Mubyarto dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 9.

¹⁵ Fetiana, *op.cit.*, hlm. 52.

¹⁶ Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 138.

¹⁷ P. van der Elst, "Krisis Budidaya Padi di Jawa", dalam Sajogyo dan William L. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 1966), hlm. 145.

masyarakat desa telah dipengaruhi oleh adanya perkebunan-perkebunan tebu maupun pabrik-pabrik gula disekitar lingkungan desa. Hal ini disebabkan oleh adanya dua tuntutan yang berasal dari desa maupun pemerintah yang berkepentingan terhadap industri gula.

Gagasan mengenai ekonomi liberal yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, ternyata hanya menguntungkan pengusaha dan pemilik modal bangsa Barat.¹⁸ Pembagian tanah persawahan di satu pihak merugikan pemilik-pemilik sawah pertanian, tetapi di lain pihak menguntungkan bukan pemilik tanah.¹⁹Adanya penyewaan lahan sawah pertanian oleh industri gula yang di dalamnya terdapat pabrik beserta perkebunannya yang tidak sesuai dengan ketentuan, mendorong penduduk desa melakukan mobilitas sosial berupa pemogokan, perlawanan, dan bahkan migrasi, sebagai akibat dari tekanan ekonomi. Namun sebagian besar petani di Karesidenan Cirebon tetap hidup pada sektor agraris, terutama pada perkebunan tebu dan pabrik gula.

F. Kesimpulan

Diberlakukanya Undang-Undang Agraria tahun 1870 merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan itu memuat dua hal pokok yaitu memberi kesempatan pihak pengusaha perkebunan untuk berkembang di tanah jajahan, juga melindungi hak-hak rakyat pribumi atas tanahnya. Eksistensi industri gula di

¹⁸ Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 10.

¹⁹ D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*, (Jakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 194.

Karesidenan Cirebon sebenarnya sudah ada semenjak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, namun ketika itu penanaman tebu dan pabrik-pabrik gula dikelola oleh orang-orang Cina.

Dalam perkembangannya, industri gula telah memberikan keuntungan ekonomis yang besar bagi pengusaha swasta maupun pemerintah. Pembukaan lahan perkebunan tebu di Karesidenan Cirebon berada di desa-desa. Distrik Sindanglaut dan Ciledug merupakan wilayah penanaman tebu pertama, semenjak riset yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1834, ternyata untuk penanaman tebu dapat dilakukan di daerah pesisir Utara Jawa. Kondisi alam serta letak geografis yang mendukung di Karesidenan Cirebon merupakan faktor pendorong untuk pembudidayaan tanaman tebu di wilayah ini.

Daftar Pustaka

Arsip

ANRI, *Memorie van Overgave van den resident van Cirebon, Van Der Marel*, 1922.

ANRI, *Memorie van Overgave van den resident van Cirebon, R. Ph. M. Van der Meer*, 1925.

ANRI, *Memorie van Overgave van den resident van Cirebon, C.J.A.E.T. Hiljee*, 1930.

Koloniaal Verslag 1881-1882.

Koloniaal Verslag 1876-1890.

Koloniaal Verslag 1896-1930.

Volkstelling 1930 Deel I Inheemsche Bevolking van West-Java.

Buku-buku dan Artikel

- Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Breman, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pradnjaparamita, 1962.
- Boomgaard, Peter, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao, *Dilema Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Lindblad, J. Thomas, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Mubyarto dan Daryanti, *Gula Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Mudji Hartono, *Sejarah Sosial Ekonomi: Kemiskinan Penduduk di Daerah Pantai Utara Jawa (1850-1940)*, Yogyakarta: UNY, 2012.
- Neil, Van Robert, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Simbolon, Parakitri T., *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*, Bandung: UNPAD & PEMDA Jawa Barat, 1991.
- Van der Elst, P., ‘Krisis Budidaya Padi di Jawa’, dalam Sajogyo dan William L. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*, Jakarta: LP3ES, 1966.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

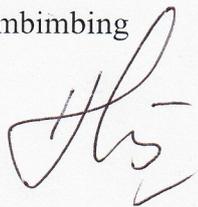
- Awaludin Nugraha, ‘Industri indigo dan Kehidupan Sosial Ekonomi Petani di Karesidenan Cirebon 1830-1864’, Tesis, Yogyakarta: UGM, 2001.
- Fetiana, ‘Perkebunan Tebu di Karesidenan Besuki Masa Liberal’, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2013.

Nazat Adi Prabowo, “Perkebunan Tebu di Karesidenan Tegal 1830-1870”,
Skripsi, Yogyakarta: UNY, 2006.

Retno Puji Lestari, “Nasionalisasi Industri Gula di Madiun: Pabrik Gula Pagottan,
Kanigoro, dan Redjo Agung Baru Tahun 1950-1966”, *Skripsi*,
Yogyakarta: UNY, 2015.

Yogyakarta, 1 Oktober 2015

Pembimbing



Mudji Hartono, M.Hum.

NIP. 19550115 198403 1 001

Reviewer



Ririn Darini, M.Hum.

NIP. 19741118 199903 2 001